

**MODEL ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG
GOOD GOVERNANCE : STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2011- 2014**

Nano Prawoto¹
Agus Tri Basuki²

***Abstract: Model Analysis of Public Expenditure Composition to Economic Growth in Supporting Good Governance: Empirical Study of Regency of City in Indonesia Year 2011-2014.** This study aimed to analyze the quality of local government spending on economic growth. The method used in this study is the linear regression panel data. regional spending on health has an influence on economic growth, so that the local government must continue its program of Healthy Indonesia which is to protect the health of its citizens through BPJS or other health insurance. Education spending has no positive effect on economic growth in a region. It is caused by an increase in the education budget has not been matched by an increase in equity of education in certain areas, such as the lack of teachers, school buildings are not feasible and the lack of teaching and learning facilities. Kids are the future investment of the nation, so the government needs to increase the resources of children through free education at least 15 years old (elementary through high school), and for remote areas in 2020 should have a minimum of 12 years education. While the relationship between the BPK's opinion and economic growth have an inverse relationship, meaning that if the BPK's opinion on the financial statements of local government improved had lower economic growth, this is due to the CPC simply checking the audit of financial statements is in accordance with the prescribed rules but did not see the performance but only saw whether the money spent already by the rules. The government through the minister of the interior had to seek enforcement of Performance-Based Budgeting, meaning that any public money spent should be coupled with a measurable performance that can push people's welfare.*

Abstrak: Model Analisis Komposisi Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Good Governance: Studi Empiris Kabupaten Kota di Indonesia Tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel regresi linier. Belanja daerah untuk kesehatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah harus melanjutkan programnya Sehat Indonesia yaitu untuk melindungi kesehatan warganya melalui BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Belanja pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan anggaran pendidikan yang belum diimbangi oleh kenaikan pemerataan pendidikan di daerah tertentu, seperti minimnya guru, bangunan sekolah tidak layak dan minimnya fasilitas belajar mengajar. Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa, sehingga pemerintah perlu meningkatkan sumber daya anak

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email: agustribasuki@yahoo.com

melalui pendidikan gratis minimal 15 tahun (SD sampai SMA), dan untuk daerah terpencil pada tahun 2020 harus memiliki minimal 12 tahun pendidikan. Sedangkan hubungan antara pendapat BPK dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik, artinya jika pendapat BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah membaik memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, hal ini disebabkan BPK cukup mengecek audit terhadap laporan keuangan yang sesuai. Dengan aturan yang ditentukan tapi tidak melihat kinerjanya tapi hanya melihat apakah uang tersebut sudah habis dengan aturan. Pemerintah melalui menteri dalam negeri harus mencari penegakan Penganggaran Berbasis Kinerja, artinya uang publik yang dibelanjakan harus digabungkan dengan kinerja terukur yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, penganggaran berbasis kinerja, dan kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan regional tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukan pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah yang dimilikinya.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan (RPJMN 2014-2019).

Selanjutnya penjabaran TRISAKTI (LIHAT RPJMN Pemerintahan Jokowi) diwujudkan dalam bentuk: Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi

perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mawujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan perencanaan dan pengawasan pengeluaran negara/daerah maka akan berdampak pada kondisi perekonomian yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi kebocoran APBN atau APBD maka pemerintah perlu melakukan pengawasan dengan bantuan KPK dan BPK. kebijakan fiskal (APBN/APBD) memiliki fungsi :

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selain dengan perencanaan dan pengawasan APBN/APBD dalam mempengaruhi kondisi perekonomian, investasi juga dapat diandalkan untuk menciptakan strategi pembangunan Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job.

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta

partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumber daya ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (local discretion) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (local needs).

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan peranan pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, Kelautan dan Perikanan dan, Investasi serta opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan terciptanya good governance.

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat kita rumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Seberapa besar pengaruh antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Seberapa besar pengaruh antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Seberapa besar pengaruh antara antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Seberapa besar pengaruh antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Bagaimana kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Ingin mengetahui hubungan antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Ingin mengetahui hubungan antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Ingin mengetahui hubungan antara antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Ingin mengetahui hubungan antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana

proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program guideliness yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta. Sebagian besar dari komponen kebijakan yang ada di dalamnya justru didominasi oleh unsur-unsur tidak produktif dan tidak dinamis.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peranan distribusi pendapatan atau kekayaan; dan (3) peranan stabilisasi perekonomian (Mangkoesobroto, 2001)

Peranan stabilisasi perekonomian sangat penting dilakukan karena keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran dan neraca pembayaran luar negeri yang terus menerus defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki bangsa manapun di bumi ini. Oleh karena masalah tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi agregat dan hanya dapat diatasi dengan mengendalikan jalannya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka salah satu kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah ditunjukkan oleh besarnya APBN/APBD yang diperlukan sebagai suatu pedoman sehingga kegiatan pemerintah itu dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat mengadakan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dalam pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, dimana peranan pemerintah daerah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah daerah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali

bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program *guidelines* yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta.

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2).

Menurut hasil pengamatan empiris Adolp Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Wagner mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Menurut Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu, tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

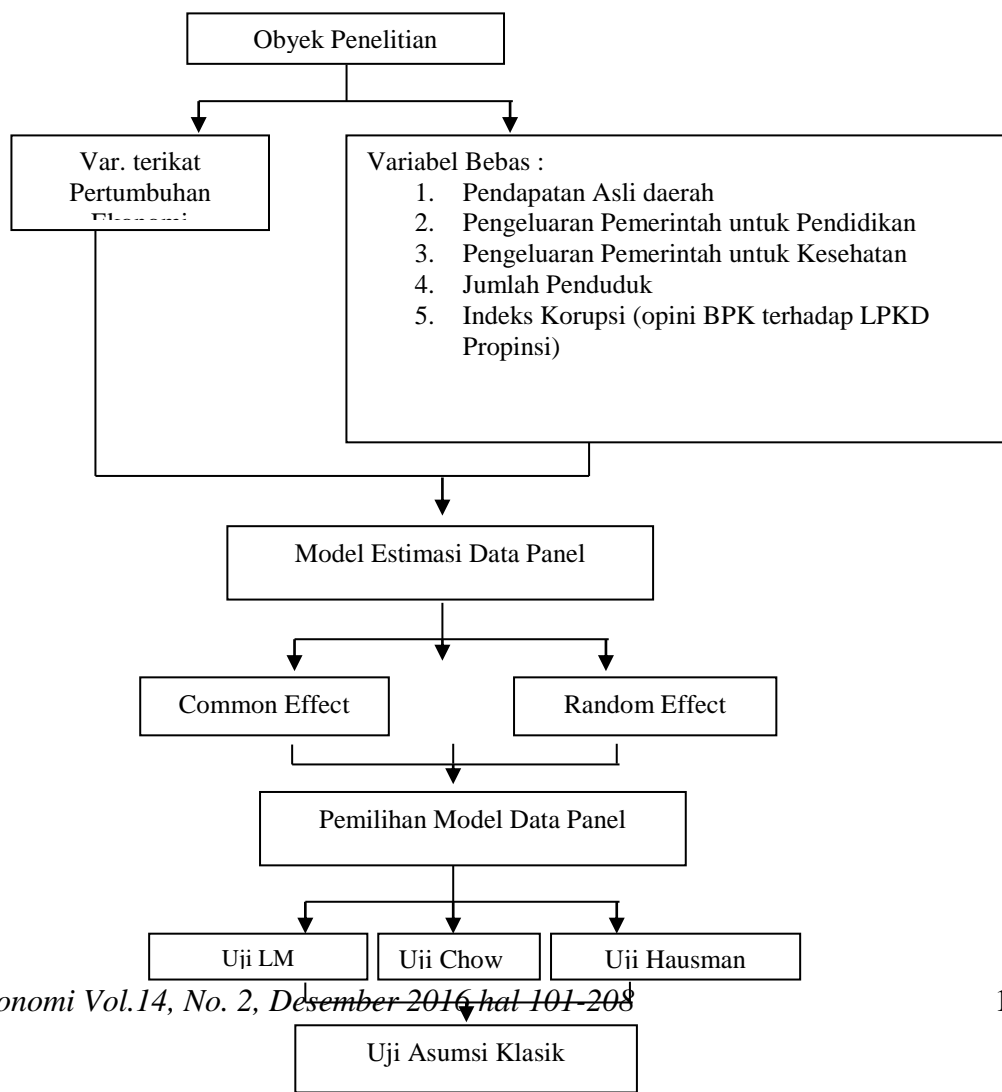
Menurut hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri-masyarakat, dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II.1. secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesebroto, 1993:171).

W.W. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total investasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang di timbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dan penyediaan prasarana ekonomi kepengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatannya juga berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara.

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy 1996:161). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan ahir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut.



Sumber : Gujarati, 2003

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Kerangka pemikiran seperti di atas digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila kita lihat pada kerangka pikir dibawah, dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran untuk kesehatan (KESH), Pengeluaran untuk Pendidikan (EDUC), Jumlah penduduk (PENDDK) dan Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis Penelitian, dari kerangka teori dan penelitian terdahulu maka dapat kita turunkan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Diduga ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Diduga ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Diduga ada hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Diduga ada hubungan negatif antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel).

Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross section maupun time series. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat

diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

Menurut Wibisono (2005) keunggulan regresi data panel antara lain : Pertama. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan Keenam, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|---|
| Y | = | Variabel dependen (LDR) |
| α | = | Konstanta |
| X1 | = | Variabel independen 1 |
| X2 | = | Variabel independen 2 |
| b(1...2) | = | Koefisien regresi masing-masing variabel independen |
| e | = | Error term |
| t | = | Waktu |
| i | = | Perusahaan |

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

| Variabel | Prob. |
|--------------|--------|
| C | 0.3731 |
| LOG(PAD?) | 0.9690 |
| LOG(KESH?) | 0.5807 |
| LOG(EDUC?) | 0.3566 |
| LOG(PENDDK?) | 0.9946 |
| OPINI? | 0.0252 |

Sumber : Data diolah

Keterangan :

*** = signifikan 1% ** = signifikan 5% * = signifikan 10%

Dari tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas. Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai standard error yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Santoso, 2005).

Dari lampiran dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel independen tidak lebih besar dari [0,9] dengan demikian data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dalam analisa model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (ordinary/pooled least square), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak (random effect). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode Pooled least square atau Fixed effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 2

Hasil Estimasi Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Opini BPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa dan sumatra

| Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB)) | Model | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| | Common Effect | Fixed Effect | Random Effect |
| Konstanta | -6.07371 | -26.3703 | -6.18071 |
| Standar error | 1.049039 | 2.03595 | 1.436591 |
| Probabilitas | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| LOG(PAD) | 0.626191 | 0.055386 | 0.134391 |
| Standar error | 0.077517 | 0.013214 | 0.021281 |
| Probabilitas | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| LOG(KESH) | -0.03303 | 0.007851 | 0.006934 |
| Standar error | 0.124984 | 0.005073 | 0.016264 |
| Probabilitas | 0.792 | 0.13 | 0.67 |
| LOG(EDUC) | 0.078158 | -0.00647 | 0.001521 |
| Standar error | 0.142827 | 0.007484 | 0.018637 |
| Probabilitas | 0.585 | 0.39 | 0.94 |
| LOG(PENDDK) | 0.539554 | 2.623983 | 0.982667 |
| Standar error | 0.087343 | 0.167768 | 0.117329 |
| Probabilitas | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Dummy | -0.12023 | -0.00893 | -0.01856 |
| Standar error | 0.049481 | 0.004154 | 0.009077 |
| Probabilitas | 0.017 | 0.03 | 0.04 |
| R2 | 0.784428 | 0.999863 | 0.667205 |
| Fstatistik | 85.87597 | 18384.13 | 32.34642 |
| Probabilitas | 0.000000**** | 0.000000**** | 0.000000**** |

Sumber: Data diolah

Keterangan : **** = signifikan 1% *** = signifikan 5% ** = signifikan 10%

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Uji Likelihood dan Hausman Test keduanya menyarankan untuk menggunakan Fixed Effect, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Fixed Effect Model. Dipilihnya Fixed Effect Model karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari Fixed Effect Model lebih signifikan dibanding Random Effect Model atau Common Effect Model yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan sehingga model yang lebih baik yaitu Fixed Effect Model.

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sample, uji Chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode Pooled least square atau Fixed Effect. Jika nilai F statistik pada uji Chow signifikan, maka uji Hausman akan dilakukan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau Random Effect. Hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas yang kurang dari Alpha adalah signifikan, artinya metode Fixed Effect yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan Fixed Effect dan Random Effect serta mengkombinasikan, baik cross-section, period, maupun gabungan cross-section/period.

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Common/Pool Effect Model. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah Common Effect Model. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

$$\begin{aligned}
 F_{n-1, nt, n-k} &= \frac{(30,35694 - 0,045077)/(31 - 1)}{0,045077/(124 - 31 - 5)} \\
 &= 1,011898/0,000512 \\
 &= 1975,443 \\
 F\text{-tabel} &= \alpha ; df (n-1, nT-n-k) \\
 &= 5\% ; (31 - 1, 124 - 31 - 5) \\
 &= 5\% ; (30, 88) \\
 &= 1,649
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan F-hitung didapat sebesar 1975,443 sedangkan F-tabel dari numerator 30 dan denomenator 88 pada α : 5% adalah 1,649. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel ($1975,443 > 1,649$), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Berdasarkan tabel Uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut Uji Chow, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode Fixed effect. Berdasarkan hasil Uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara Random Effect dengan Fixed Effect. Jika dari hasil Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model Random Effect. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model Fixed Effect.

TABEL 3
Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi- Sq.d.f | Prob. |
|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| Cross-section random | 69,481407 | 4 | 0.0000 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel Uji Hausman, nilai probabilitas Cross-section random adalah 0,0000 yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode Fixed Effect.

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Fixed Effect Model (FEM) adalah teknik estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perbedaan intercept antar cross section. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 31 kabupaten/kota selama periode 2011-2014 (4 tahun).

TABEL 4
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

| Variabel Dependen : | Model |
|---------------------------------|--------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB)) | Fixed Effect |
| Konstanta | -26.3703 |
| Standar error | 2.03595 |
| Probabilitas | 0,000 |
| LOG(PAD) | 0.055386 |
| Standar error | 0.013214 |
| Probabilitas | 0.0001 |
| LOG(KESH) | 0.007851 |
| Standar error | 0.005073 |
| Probabilitas | 0.1253 |
| LOG(EDUC) | -0.00647 |
| Standar error | 0.007484 |
| Probabilitas | 0.3899 |
| LOG(PENDDK) | 2.623983 |
| Standar error | 0.167768 |
| Probabilitas | 0,000 |
| Dummy | -0.00893 |
| Standar error | 0.004154 |
| Probabilitas | 0.0344 |
| R2 | 0.999863 |
| Fstatistik | 18384.13 |
| Probabilitas | 0,00 |
| Durbin-Watson stat | 1.110336 |

Sumber: Hasil Pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi studi kasus di Sumatera dan Jawa di interpretasikan sebagai berikut:

$$\text{LOG (PDRB)} = \beta_0 + \beta_1 * \text{LOG(PAD)} + \beta_2 * \text{LOG(KESH)} + \beta_3 * \text{LOG(EDUC)} + \beta_4 * \text{LOG(PEND)} + \beta_5 * \text{Dummy} + \text{et}$$

Keterangan:

LOG(PDRB) = Penyerapan Tenaga Kerja

LOG(PAD) = Jumlah Unit Usaha

LOG(KESH) = Nilai Investasi

LOG(EDUC) = Nilai Produksi

LOG(PEND) = Upah Minimum

DUMMY = opini BPK terhadap LKPD

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Parameter

et = Disturbance Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$\text{LOG (PDRB)} = \beta_0 + \beta_1 * \text{LOG(PAD)} + \beta_2 * \text{LOG(KESH)} + \beta_3 * \text{LOG(EDUC)} + \beta_4 * \text{LOG(PEND)} + \beta_5 * \text{Dummy} + \text{et}$$

$$\text{LOG (PDRB)} = -26,3703 + 0,055386 * \text{LOG(PAD)}^{***} + 0,007851 * \text{LOG(KESH)} * - 0,00647 * \text{LOG(EDUC)} + 2,62398 * \text{LOG(PEND)}^{****} - 0,00893 * \text{Dummy}^{***} + \text{et}$$

Dimana :

**** dimana signifikan pada alpha 1 persen

*** dimana signifikan pada alpha 5 persen

** dimana signifikan pada alpha 10 persen

* dimana signifikan pada alpha 20 persen

$\beta_0 =$ -26,3703 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (PAD, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran kesehatan, jumlah penduduk dan opini BPK terhadap LKPD) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi (antilog -26,37 sama dengan mendekati enol) di wilayah Sumatera dan Jawa.

$\beta_1 =$ 0,055386 dapat diartikan faktor lain dianggap tetap maka jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,055 persen.

$B_2 =$ 0,007851 dapat diartikan faktor lain dianggap tetap maka jika Belanja Kesehatan meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0078 persen. Peningkatan Biaya kesehatan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat dan berimbas pada peningkatan produktivitas penduduk.

$B_3 =$ 0,00647 dapat diartikan faktor lain dianggap tetap maka jika belanja pendidikan meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00647 persen. Artinya pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, hal ini peningkatan pendidikan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tetapi jika dilihat dari hasil regresi terlihat bahwa secara parsial belanja

pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini diakibatkan masih rendahnya angka lama sekolah di Indonesia, rata-rata lama sekolah kurang dari 9 tahun atau belum lulus SMP.

B4 = 2,62398 dapat diartikan faktor lain dianggap tetap maka jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,62 persen. Dalam jangka pendek perkembangan penduduk memiliki manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

B5 = - 0,00893 dapat diartikan faktor lain dianggap tetap maka jika terdapat hubungan yang terbalik antara opini BPK dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah membaik justru menurunkan pertumbuhan ekonomi, hal ini diakibatkan BPK hanya memeriksa audit laporan keuangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi tidak melihat kinerja tapi hanya melihat apakah uang yang dibelanjakan sudah sesuai aturan.

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota di Jawa dan Sumatera yang diinterpretasi sebagai berikut: Pada model estimasi di atas, terlihat bahwa adanya pengaruh variabel cross-section yang berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di Wilayah Jawa dan Sumatra terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di. Dimana Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Dairi, Pasaman, payakumbuh, Sawahlunto, Bengkalis, OKU, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahiyang, Sukabumi dan Blitar memiliki pengaruh efek cross-section (efek wilayah operasional) yang bernilai positif, yaitu masing-masing wilayah memiliki nilai koefisien antara 0,08 sampai dengan 3,56. Sedangkan pada kabupaten/kota yang memiliki pengaruh efek cross-section (efek wilayah operasional) yang bernilai negatif, yaitu Kabupaten Bireuen, Asahan, Deliserdang, Agam, Padang, Kampar, Merangin, Tebo, Musirawas, Muaraenim, OKI, Bengkulu Utara, Lampung Tengah, Brebes, Magelang, Surakarta dan Kabupaten Kulon Progo yaitu antara -3,26 sampai dengan -0,07.

Dari masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa dan Sumatra, daerah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Kabupaten Blitar (3,56) yang perekonomiannya ditopang dari sector pertanian, Kota Sawahlunto (3,38) yang perekonomian ditopang oleh pertambangan, pertanian dan sector pariwisata, dan Kabupaten Payakumbuh (2,01) yang perekonomiannya ditopang sector perdagangan dan pertanian. Sedangkan Kabupaten Brebes (-3,26), Kota deliserdang (-2,433) dan Kabupaten Lampung tengah (-2,08) yang memiliki pengaruh cross Section yang sangat kecil dalam pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi PAD akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Belanja untuk kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, semakin besar anggaran kesehatan semakin besar pertumbuhan ekonomi yang diciptakan. Peningkatan anggaran kesehatan berdampak pada peningkatan produktivitas pekerja, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini diakibatkan karena peningkatan anggaran pendidikan belum diimbangi oleh peningkatan pemerataan pendidikan di daerah-daerah tertentu, seperti minimnya guru, gedung sekolah yang belum layak serta minimnya fasilitas belajar mengajar. Jumlah penduduk

memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam jangka pendek perkembangan penduduk memiliki manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang perlu diperhatikan, karena bias terjadi pertumbuhan penduduk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada hubungan yang terbalik antara opini BPK dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah membaik justru menurunkan pertumbuhan ekonomi, hal ini diakibatkan BPK hanya memeriksa audit laporan keuangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi tidak melihat kinerja tapi hanya melihat apakah uang yang dibelanjakan sudah sesuai aturan.

Dari hasil analisis dapat diambil rekomendasi sebagai berikut: Belanja pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini diakibatkan karena peningkatan anggaran pendidikan belum diimbangi oleh peningkatan pemerataan pendidikan di daerah-daerah tertentu, seperti minimnya guru, gedung sekolah yang belum layak serta minimnya fasilitas belajar mengajar. Anak adalah investasi masa depan bangsa, sehingga pemerintah perlu meningkatkan sumber daya anak melalui pendidikan gratis minimal 15 tahun (SD sampai dengan SMA), dan untuk daerah terpencil tahun 2020 sudah harus mengenyam pendidikan minimal 12 tahun. Ada hubungan yang terbalik antara opini BPK dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah membaik justru menurunkan pertumbuhan ekonomi, hal ini diakibatkan BPK hanya memeriksa audit laporan keuangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi tidak melihat kinerja tapi hanya melihat apakah uang yang dibelanjakan sudah sesuai aturan. Pemerintah melalui menteri dalam negeri harus mengupayakan pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja, artinya setiap uang rakyat yang dikeluarkan harus dibarengi dengan kinerja yang terukur yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Barro, Robert J., "A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government," National Bureau of Economic Research, working paper No. 2855, February 1989.
- , "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy*, XCVIII (1990), S103-25.
- , and Gary S. Becker, "Fertility Choice in a Model of Economic Growth," *Econometrica*, LVII (1989), 481-501.
- , and Xavier Sala i Martin, "Economic Growth and Convergence across the United States," National Bureau of Economic Research, working paper, July 1990.
- , and , "The Neoclassical Growth Model," Chapter 1 of unpublished manuscript, 1991.
- , and Holger C. Wolf, "Data Appendix for Economic Growth in a Cross Section of Countries," unpublished, National Bureau of Economic Research, November 1989.

- David E. Bloom, David Canning, Linlin Hub, Yuanli Liu, Ajay Mahal, Winnie Yip, (2010), The contribution of population health and demographic change to economic growth in China and India, *Journal of Comparative Economics* 38 (2010) 17–33
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. 4th Edition. McGraw-Hill, New York, USA.
- Gujarati, Damodar, (1995). *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kwabena Gyimah-Brempong, (2002), Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, *Econ. Gov.* (2002) 3: 183–209
- Kevin Sylwester, (2000), Income inequality, education expenditures, and growth, *Journal of Development Economics* Vol. 63 _2000. 379–398
- N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2 (May, 1992), pp. 407-437
- Paolo Mauro, (1995), Corruption and Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712.
- Rock-Antoine Mehanna, The Temporal Causality Between Investment And Growth In Developing Economies, *Journal Of Business And Economics Research* Volume 1, Number 3, p. 85-91.
- Suleiman A.S. Aruwa, (2012), Public finances and economic growth in Nigeria, *Public and Municipal Finance*, Volume 1, Issue 2, 2012, pp. 29-36
- Sadono Sukirno, (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta
- Sukirno, (2007). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Penerbit Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001), *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro M.P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.